



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. May. Jend. Sungkono Km 2 Purbalingga ☎ (0281) 891235



**RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020**

---

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kehadirat Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Renja OPD ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2020.

Dengan telah tersusunya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2020 adalah untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik dan dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, semoga Renja OPD ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai target, Amien.

Purbalingga,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA,



ATO SUSANTO, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
2.1 Landasan Hukum .....	1
3.1 Maksud dan Tujuan .....	2
4.1 Sistematika Penulisan .....	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU .....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	12
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH .....	12
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (Memuat Program Dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif) .....	19
BAB V. PENUTUP .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2020 memuat program dan kegiatan Tahun 2020, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2021.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Masyarakat, Renja DPMPTSP 2020 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Selanjutnya Renja DPMPTSP 2020 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2020.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614) ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021;
  7. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
  8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perencanaan OPD setelah adanya anggaran kegiatan, serta menggambarkan target capaian kinerja yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang perizinan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah ***Meningkatnya Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.***

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 adalah :

### **Bab I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PADA TAHUN LALU**

Bab II ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP, Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, Pos Pendapatan Tahun 2019 Target sebesar Rp. 1.475.094.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 904.414.639,00 atau mencapai 61,31 % realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah (IMB), Pos Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.418.349.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 2.2.253.679.467,00 atau sebesar 93,19% dari pagu anggaran, sehingga ada penghematan anggaran sebesar Rp 164.669.533,00 atau sebesar 6,81%. Sedangkan untuk Pos Belanja Langsung pagu anggaran sebesar Rp.1.624.172.000,00, realisasi sebesar Rp.1.517.468.174,00 atau 93,43 % dari pagu anggaran, sehingga ada penghematan anggaran sebesar Rp. 106.703.826,00 atau sebesar 6,57%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

##### 1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp 933.272.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 875.844.473,00 ( 93,85% ) dengan efisiensi sebesar Rp 57.427.527,00 ( 6,15%). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

##### a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.

Pagu anggaran sebesar Rp. 417.700.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 382.442.989,00 (91,56 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 35.257.011,00 (8,44 %). Keluarannya berupa tersedianya administrasi kantor bagi 31 Pegawai.

##### b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Pagu anggaran sebesar Rp. 133.630.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 133.548.767,00 (99,94%) dengan efisiensi sebesar Rp. 81,233,00 (0,06%). Keluarannya berupa terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sebanyak 125 oh.

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Keluarannya yaitu .

Pagu anggaran sebesar Rp. 186.942.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 171.275.974,00 (91,62%) dengan efisiensi sebesar Rp. 15.666.026,00 (8,38%). Keluarannya yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor berupa 1 gedung kantor, 12 kendaraan dinas roda dua, serta 4 kendaraan dinas roda empat dll.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Pagu anggaran sebesar Rp. 165.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan Rp. 159.759.400,00 (96,82%) dengan efisiensi sebesar Rp. 5.240.600,00 (3,18%). Keluarannya yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor, berupa : kios informasi perizinan, tenda knock down, meja kursi portable, router wifi, power inventer, sound system portable, tv LED 32 inci..

e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-. Realisasi Fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 19.981.343,00 (99,91%) dengan efisiensi sebesar Rp. 18.657,00 (0,09%). Keluarannya yaitu. Keluarannya berupa tercukupinya Diklat PNS sebanyak 10 Pegawai.

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-. Realisasi Fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 8.836.000,00 (86,36%) dengan efisiensi sebesar Rp. 1.164.000,00 (11,64%). Keluarannya berupa dokumen perencanaan dan laporan tahunan, yaitu Renstra, Renja, Laporan Kinerja OPD, LKPJ, LKD., LKJIP

2. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi.

Pagu anggaran sebesar Rp. 310.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 300.117.662,00 (96,81%) dengan efisiensi sebesar Rp. 9.882.338,00 (3,19%). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 121.707.000,00 (97,37%), efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.293.000,00 (2,63%). Keluarannya Terlaksananya promosi 2 kegiatan dan pameran 1 kegiatan yang diikuti guna memperluas jaringan pemasaran potensi daerah.

b. Business Gathering (Temu Bisnis)

Pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangansebesar Rp. 94.943.662,00 (94,94%), efisiensi anggaran sebesar

Rp 5.056.338,00 (5.06%). Keluarannya berupa Terlaksananya solusi permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha.

c. Updating Buku Induk Penanaman Modal.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 54.484.000,00 (99,06%), efisiensi anggaran sebesar Rp. 516.000,00 (0,94 %) Keluarannya berupa buku kajian investasi 20 dan buku induk penanaman modal sebanyak 50 buku.

d. Pemantauan dan pengendalian.Penanaman Modal.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 28.983.000,00 (96,91%), efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.017.000,00. (3,39 %) Keluarannya berupa terlaksananya Kunjungan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal ke Perusahaan..

3. Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pagu anggaran sebesar Rp. 380.900.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 341.506.039,00 (89,66%) dengan efisiensi sebesar Rp. 39.393.961,00 (10,34%). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan.

Pagu anggaran sebesar Rp. 242.500.000,00. Realisasi fisik 100%. realisasi keuangan sebesar Rp. 221.540.000,00 (91,36%). Efisiensi anggaran sebesar Rp. 20.960.000,00 (8,64%). Keluarannya berupa Terlaksananya jumlah obyek retribusi perizinan yang dapat diperiksa.

b. Akuisisi Arsip.

Pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00. Realisasi fisik 100%. realisasi keuangan sebesar Rp. 13.613.500,00 (90,76%). efisiensi sebesar Rp. 1.386.500,00 (9,24%). Keluarannya berupa tersusunya dokumen kearsipan perizinan dengan baik.

c. Penguatan Pelayanan Perizinan (sosialisasi perizinan)

Pagu anggaran sebesar Rp. 123.400.000,00. Realisasi fisik 100%. realisasi keuangan sebesar Rp. 106.352.5390,00 (86,19%). efisiensi sebesar Rp. 17.047.461,00 (13,81%). Keluarannya berupa tersosialisasinya perizinan dan fasilitasi perizinan online.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Secara umum kinerja pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

### A. Bidang Penanaman Modal

Realisasi investasi baru dan pengembangan / perluasan sektor swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.A1.

Tabel Realisasi Investasi Baru di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)
1.	2015	230.003.281.000
2.	2016	483.271.000.000
3.	2017	547.076.000.000
4.	2018	622.870.314.578
5.	2019	679.695.974.162

Tabel 2.2.A2.

Daftar Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2018.

No.	Nama Perusahaan
1	PT. ROYAL KORINDAH
2	PT. BOYANG INDUSTRIAL
3	PT. INDOKORES SAHABAT
4	PT. KESAN BARU SEJAHTERA
5	PT. SUNG CHANG INDONESIA
6	PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL
7	PT. HASTA PUSAKA SENTOSA
8	PT. YURO MUSTIKA
9	PT. HANMI HAIR INTERNATIONAL
10	PT. INTERWORK INDONESIA
11	PT. DUE DREAM INTERNATIONAL
12	PT. MIDAS INDONESIA
13	PT. MILAN INDONESIA
14	PT. WON JIN INDONESIA
15	PT. YE JIN BEAUTY ORNAMENT

16	PT. SOPHIAN INDONESIA
17	PT. HYUP SUNG INDONESIA
18	PT. BOUYOUNG PROFESIONAL
19	PT. EYERICH
20	PT. CHUNIL INDONESIA
21	PT. INTER COSTECH INDONESIA
22	PT. JOHN TOYS INDONESIA
23	PT. NINA VENUS
24	PT. UNIVERSAL FISHING GEAR SOLUTIONS

## B. Bidang Pelayanan Perizinan

Kinerja layanan perizinan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.B1

Tabel kinerja layanan perizinan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

No	Jenis Izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	19	10	11	9	380
2.	Izin Gangguan (HO)	787	772	619	-	-
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	572	641	922	652	655
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	755	1.004	1.036	699	442
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	708	1.016	1.046	706	717
6.	IUI/TDI	21	30	42	59	38
7.	Izin Reklame	962	913	512	388	463
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	147	146	87	90	67
9.	Izin Mendirikan Perusahaan	15	22	7	2	1
10.	Pengangkutan (IMPP)					
	Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)	9	15	11	10	16
11.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	21	51	36	14	10
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	1	-	-
13.	Izin Bidang Kesehatan (15 jenis)	-	-	320	1.334	797
14.						
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.016</b>	<b>4.620</b>	<b>4.650</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan (Tabel 2.2.B2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dulu KPMP) Kabupaten Purbalingga  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan (Tabel 2.2.B3) DPMPTSP (dulu KPMP) Tahun 2011 s/d 2015

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah investor				67	70	77	477	501	89	80	539	533	627	132.84	114.29	700.00	111.74	125.15
	Total nilai investasi				227.867.833.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	300.000.000.000	339.768.000.000	342.500.000.000	477.115.287.000	314.812.853.495	230.003.281.000	149.11	137.00	202.68	125.93	76.33
	Jumlah PMA				20 (Akumulasi)	2 (penambahan)	2 (penambahan)	2 (penambahan)	1 (penambahan)	21 (akumulasi)	2 (penambahan)	2 (penambahan)	1 (penambahan)	2 (penambahan)	105.00	100.00	100.00	50.00	200.00
	Nilai Investasi PMA				151.904.511.500	50.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	10.000.000.000	154.514.511.500	35.000.000.000	29.586.601.000	3.512.100.000	14.923.200.000	101.72	71.60	118.35	14.05	149.23
	Jumlah PMDN				2	68	75	475	500	79	78	537	532	625	3950.00	114.71	716.00	112.00	125.00
	Nilai Investasi PMDN				8.000.000.000	200.000.000.000	225.000.000.000	225.000.000.000	290.000.000.000	32.000.000.000	306.700.000.000	477.115.787.000	302.280.853.495	214.080.081.000	401.13	153.35	212.05	134.35	73.82
	Indek Kepuasan Masyarakat				81	82	81	82	82	88.27	75.23	73.01	82.99	82.59	108.98	91.74	90.14	101.21	100.72
	Rata-rata proses perizinan				6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti				9	7	5	5	5	12	7	5	16	10	133.33	100.00	100.00	320.00	200.00
	<i>Jenis izin yang diterbitkan</i>																		
	Izin Reklame				914	800	850	800	850	845	842	718	966	962	92.45	105.25	84.47	120.75	113.18
	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				645	1.000	656	750	700	1.423	1.338	1.249	725	572	220.62	133.80	190.40	96.67	81.71
	Izin Gangguan (HO)				775	643	550	725	725	699	873	768	788	787	90.19	135.77	139.64	108.69	108.55
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				736	650	680	685	685	617	685	744	731	755	83.83	105.38	109.41	106.72	110.22
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				527	500	600	600	625	475	655	668	751	708	90.13	131.00	109.67	125.17	113.28
	Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUK)				100	33	45	45	75	50	61	74	145	147	50.00	184.85	164.44	322.22	196.00
	Izin Pengerangan				7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Izin Lokasi / Pemanfaatan Tanah				13	10	10	10	16	11	6	1	8	19	84.62	60.00	10.00	80.00	118.75
	Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (MPP)				78	38	25	10	8	26	5	3	10	15	33.33	13.16	12.00	100.00	187.50
	Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri (IUI/TDI)				42	40	22	9	16	31	15	4	18	21	73.81	37.50	18.18	200.00	131.25
	Izin Pertambangan Gol. C				9	12	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Izin Penggilingan Padi				0	0	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Izin Pemakaian Tanah Pengairan				-	-	-	12	-	-	-	-	22	-	-	-	-	183.33	-
	IUIPHK				-	-	-	4	-	-	-	-	8	-	-	-	-	200.00	-
	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)				-	-	-	-	16	-	-	-	-	21	-	-	-	-	131.25
	PAD Retribusi				1.379.906.000	1.679.906.000	1.744.906.000	1.694.906.000	1.864.906.000	1.633.276.554	1.440.980.566	1.769.229.491	2.426.104.510	2.206.402.211	118.36	85.78	101.39	143.14	118.31

## **2.1 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu mencakup:
  1. Masih terdapatnya regulasi dari Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) yang kurang mendukung kegiatan penanaman modal;
  2. Masih belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  3. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu;
  4. Belum semua unit melaksanakan fungsi utama bidang penanaman modal yaitu promosi, pelayanan perizinan, dan pengendalian penanaman modal;
  5. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu:
  1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
  2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terbaru dalam menunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  3. Belum terbangunnya sistem informasi manajemen yang menunjang pelayanan umum dan perijinan di bidang penanaman modal.
  4. Belum terbentuknya Tim Perizinan Permanen yang beranggotakan petugas dari OPD teknis yang berkantor di PTSP dan memiliki otoritas mewakili kepala OPD.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang promosi dan kerja sama, pelayanan perijinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan terpadu :

1. Masih kurangnya kompetensi SDM yang membidangi promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal;
  2. Belum adanya inovasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal.
- d. Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal secara manual maupun elektronik / SPIPISE:
1. Masih kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM yang di bidang pelayanan perizinan;
  2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu:
1. Belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;
  2. Kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :
1. Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
  2. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

## **2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Dari hasil evaluasi program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, maka Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purbalingga tahun 2017 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017 telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun Anggaran 2017.

### **2.3 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga tahun 2019 merupakan program / kegiatan yang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hal tersebut dikarenakan tidak adanya usulan program / kegiatan di Musrenbangcam Tingkat Kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada misi ke 5 yaitu *Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokasi serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja*. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*, dengan sasaran Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

#### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **3.2.1. Tujuan Pembangunan Penanaman Modal**

Pada RPJMD (2016-2021), disebutkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bersama dengan Urusan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Peternakan, Lingkungan Hidup, Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Koperasi UKM.

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Pembangunan urusan penanaman modal merupakan bagian dari Misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan pembangunan urusan penanaman modal adalah Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan tujuan pembangunan urusan penanaman modal, maka *tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah **Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.***

### **3.2.2 Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :  
**“Meningkatnya realisasi investasi baru”**

Target Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Pada tahun 2021
1		Realisasi Nilai Investasi Baru	670.000.000.000
2	Meningkatnya Iklim Investasi dan Pelayanan Perizinan	PMA dan PMDN yang beroperasi	752

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tabel 3 B1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun (Rp. Juta)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya realisasi investasi		Realisasi Nilai Investasi Baru	270.000	320.000	470.000	570.000	670.000	770.000
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Pelayanan Perizinan	PMA dan PMDN yang beroperasi	552	602	652	702	752	802

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

(Memuat Program Dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif)

**3.1 Program dan Kegiatan**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dapat dilihat melalui usulan rincian anggarannya sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Usulan Anggaran	+/-
		2019	2020	
A.	Pendapatan	1.475.094.000	1.475.094.000	0
B.	Belanja	3.895.327.000	3.947.853.000	52.526.000
	- Tidak Langsung	2.370.155.000	2.312.681.000	(57.474.000)
	- Langsung	1.525.172.000	1.635.172.000	110.000.000

Secara keseluruhan, program dan kegiatan pada Anggaran Belanja Dinas Penanaman adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG**  
**TAHUN 2019**

No.	Nama Program	Banyak Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	6 Keg	798.272.000
2.	Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi	4 Keg	310.000.000
3.	Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu	3 Keg	416.900.000
<b>Jumlah</b>		<b>13 Keg</b>	<b>1.525.172.000</b>

Adapun Program kegiatan Tahun 2020 terdiri atas :

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan 6 kegiatan sebagai berikut;
  - a. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran  
Indikator : Tercukupinya Kebutuhan Operasional dan Administrasi Kantor
  - b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  
Indikator : Terlaksananya Keikutsertaan Pegawai Dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Kabupaten
  - c. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor  
Indikator : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor
  - d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor  
Indikator : Meningkatnya Pelayanan kantor
  - e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  
Indikator : Meningkatnya Kapasitas Pegawai
  - f. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD  
Indikator : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD
- 2) Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi, dengan 5 kegiatan sebagai berikut;
  - a. Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah.  
Indikator : Memperluas Jaringan Pemasaran Potensi Daerah dan Tersusunya Raperbup.
  - b. Business Gathering (Temu Bisnis).  
Indikator : Menjaring Kepeminatan dan Fasilitasi Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga.
  - c. Penyusunan Profil Investasi dan Penanaman Modal.  
Indikator : Tersedianya Buku Induk Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga 2020 dan Kajian Investasi.
  - d. Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal  
Indikator : Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

3) Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu, dengan 2 kegiatan sebagai berikut;

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah.

Indikator : Jumlah obyek dan subyek retribusi perizinan yang dapat diperiksa

2. Akuisisi Arsip Perizinan

Indikator : Terkelolanya Arsip Perizinan Dengan Baik

3. Penguatan Pelayanan Perizinan (Sosialisasi Perizinan).

Indikator : Terlaksananya sosialisasi perizinan dan fasilitasi perizinan online..

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tabel 3 B1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahunan 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Indkatif (Rp 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi	1. Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah	Jumlah Promosi dan Pameran	DPMPTSP	3 Kegiatan	125,000	APBD	-	3 kegiatan	200,000
2. Penyusunan Provil Investasi & PM			Jumlah dokumen buku profil investasi dan buku induk PM	DPMPTSP	50 Buku +10 buku	50,000	APBD	-	50 buku + 10 buku	50,000	
3. Bussines Gathering( temu bisnis)			Jumlah Temu Bisnis	DPMPTSP	3 Kali	100,000	APBD	-	3 kali	100,000	
4. Pemantauan dan Pengendalian PM			Jumlah Peusahaan Yang Di Pantau	DPMPTSP	4 periode kegiatan kunjungan	30,000	APBD	-	4 periode kegiatan kunjungan	145,000	

	Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu	1. Penguatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Sosialisasi dan fasilitasi perizinan online	DPMPTSP	4 kegiatan	119,400	APBD	-	3 kegiatan, 2 unit media promosi	119.400
		2. Akuisisi Arsip Perizinan	Tersusunnya Arsip Perizinan	DPMPTSP	2400 Dokumen	15,000	APBD	-	2400 dokumen	15,000
		3. Pemeriksaan dan Pengawasan Objek dan Subjek retribusi Perizinan Dalam Daerah	Jumlah obyek Perizinan	DPMPTSP	750 obyek / subyek	257,500	APBD	-	750 obyek / subyek	257.500
	Penguatan kelembagaan perangkat daerah	1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Bahan dan Jasa Perkantoran	DPMPTSP	12 bulan	427.700	APBD	-	12 bulan	400,000
		2. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	DPMPTSP	125 kali	133,630	APBD	-	125 kali	133.630
		3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	DPMPTSP	1 gedung kantor, 5 kendaraan roda 4, 12 kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya	166.942	APBD	-	1 gedung kantor, 5 kendaraan roda 4, 12 kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya	166,942
		4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Yang Mendukung Kinerja Kegiatan	DPMPTSP	9 unit	175,000	APBD	-	9 unit	175,000

			5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Terlaksana Diklat ASN	DPMPTSP	10 pegawai	20,000	APBD	-	10 pegawai	20,000
			6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	DPMPTSP	5 dokumen (LKPJ, lap kinerja, renja, lap keuangan, LPP)	10,000	APBD	-	5 dokumen (LKPJ, lap kinerja, renja, lap keuangan, LPP)	10,000

**RENCANA KERJA TAHUN 2020**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN**  
**PURBALINGGA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Realisasi Nilai Investasi Baru	670.000.000.000,00
Meningkatnya iklim investasi dan pelayanan perizinan	Pelaku usaha (PMA dan PMDN) yang beroperasi	752

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dipastikan mempedomani Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016 - 2021, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Demikian penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Pembangunan dibidang Penanaman Modal secara umum untuk meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah

meningkatnya realisasi investasi baru dan meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dengan tingkat keberhasilan yang optimal sehingga sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga



ATO SUSANTO, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001